

## PERBANDINGAN KURIKULUM INDONESIA DENGAN KURIKULUM PERANCIS

Dilva Hardila<sup>1)</sup>, Novia Rahayu<sup>2)</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

email: [dilvahardila@gmail.com](mailto:dilvahardila@gmail.com)

### *Abstract*

*The education system in each country is different and has its own characteristics according to the conditions of the country that are not owned by other countries. There are some countries that have very advanced education, but many are moderate and very slow in their development. Historically, the state largely determines its education system, which can be seen from the country's educational policies and politics. Then it is also influenced by the geography of a country, the potential of natural resources and its financial policies. So far, there are countries that have made education the main goal so that the largest percentage of the state budget is used for education. And they even put teachers in very high positions with high salaries. France is one of the most advanced countries in terms of education among other European countries. France has also become a destination for education in the world so that thousands of students from all over the world are visited. In this article, we try to compare the education system in France with that in Indonesia. The aim is to take the positive values that exist in France and then apply them in Indonesia according to Indonesia's own conditions and potential. However, it will be difficult for us to match the education system in France.*

**Keywords:** *French curriculum, Indonesian curriculum*

### 1. PENDAHULUAN

Perancis adalah salah satu Negara di benua Eropa yang dikenal sebagai pusat mode dunia karena di sini banyak bermukim desainer terkenal dunia yang menghasilkan karya seni tinggi dan sebagai destinasi penting pariwisata dunia dengan iconnya menara Eiffel. Perancis adalah suatu negara besar dengan penduduk lebih dari 55 juta jiwa pada saat ini dengan luas wilayah sekitar 545.630 Km<sup>2</sup>. Tingkat pertumbuhan penduduk sekitar 0,5 persen per tahun serta kepadatan wilayah mencapai 100 jiwa per km persegi. Jika dibandingkan dengan Indonesia maka Perancis jauh lebih kecil..

Penduduk Perancis menggunakan bahasa aslinya, yaitu bahasa Perancis yang merupakan salah satu bahasa internasional karena juga digunakan pada beberapa Negara, seperti di Belgia, pada beberapa negara di kawasan Afrika Barat, pada negara bekas jajahan Perancis di Pasific dan lainnya. Bahasa Perancis juga telah menjadi bahasa pengantar resmi yang digunakan oleh Masyarakat Uni Eropa serta sebagai bahasa pengantar resmi di

badan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Di Indonesia digunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dan bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Meskipun Indonesia memiliki ratusan macam bahasa daerah, namun masyarakatnya dapat disatukan oleh Bahasa Indonesia. Akan tetapi Bahasa Indonesia belum menjadi bahasa internasional karena belum digunakan di negara-negara lain.

Selama ini banyak orang yang mengenal Perancis sebagai kota model karena dari negara ini setiap hari bahkan setiap jam lahir model-model baru, terutama fashion, kosmetik dan assesories lainnya. Akan tetapi Perancis juga memiliki kemampuan yang tinggi di bidang tekhnologi, seperti tekhnologi otomotif dengan kereta cepat, memproduksi pesawat Airbus, tekhnologi telekomunikasi dan lain sebagainya. Maka Perancis juga menempatkan diri sebagai negara industri maju di dunia.

### 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Noor (2010) menyebutkan bahwa metode kuantitatif digunakan untuk mempersentasekan jawaban

dari subjek penelitian dan hasilnya nanti akan diubah kedalam data dinyatakan kedalam bentuk uraian menggunakan metode kualitatif. ata akan dianalisis menggunakan teknik deskriptif analitik yaitu data dideskripsikan untuk mendapatkan kejelasan sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan, data tidak dianalisis dengan menggunakan rumus statistika.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### • Politik dan Tujuan Pendidikan

Pembangunan sistem pendidikan telah dilakukan sejak akhir abad ke-19, yaitu ketika Jules Ferry, seorang pengacara dari Menteri Pengajaran Publik (Minister of Public Instruction) membuat terobosan baru dalam pembangunan pendidikan di Perancis, yaitu mewujudkan sekolah republikan modern yang dapat menampung semua anak dibawah usia 15 tahun. Kemudian juga mewajibkan pendidikan bagi rakyat secara gratis (free of charge) sesuai peraturan dalam “La loi d’orientation sur l’éducation No. 89-486 tertanggal 10 Juli 1989“. Dalam hal ini pendidikan menempati urusan pertama dalam skala prioritas nasional Perancis.

Sementara itu sistem Pendidikan Nasional Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang terdiri atas:

1. Pendidikan umum: memprioritaskan penguasaan pengetahuan umum dan perbaikan keterampilan siswa.
2. Pendidikan vokasional: mempersiapkan siswa dengan sejumlah keterampilan vokasional yang dibutuhkan para pekerja.
3. Pendidikan berkebutuhan khusus: memberikan keterampilan dan kemampuan penting bagi siswa dengan keterbatasan fisik dan mental.
4. Pendidikan kedinasan: bertujuan untuk meningkatkan kemampuan yang dibutuhkan sebagai persiapan dan meningkatkan kapasitas sebagai calon pegawai negeri pemerintahan,

5. Pendidikan agama: mempersiapkan siswa untuk memperoleh pengetahuan khusus tentang agama dan pelajaran yang terkait.
6. Pendidikan yang berorientasi akademik berfokus kepada perbaikan penguasaan sains,
7. Pendidikan professional: mempersiapkan siswa untuk menguasai spesialisasi pekerjaan yang berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan.

Pendidikan adalah suatu hak dan sekaligus kewajiban bagi anak-anak yang berusia antara enam hingga enam belas tahun dengan beban biaya sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah. Sementara itu di Indonesia pendidikan juga telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan pada pasal 31 (1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Berarti Indonesia juga sudah menjamin warganya untuk memperoleh pendidikan yang disediakan oleh pemerintah, seperti wajib belajar yang diatur oleh Peraturan Pemerintah RI Nomor: 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar.

Pada dasarnya penyelenggaraan pendidikan di Perancis berlangsung secara sentralistik karena dipengaruhi oleh sistem politik dan sejarah pemerintahannya yang berulang kali bersifat sentralistik pula. Maksud dari sentralistik di sini yakni pendidikan dipusatkan sepenuhnya kepada pemerintah. Kementrian Pendidikan (Ministry of National Education) memiliki peran sangat penting dalam memajukan pendidikan secara keseluruhan. Selain itu, pemerintah juga menekankan program wajib belajar 16 tahun secara gratis pada setiap jenjang pendidikan. Di Indonesia pendidikan juga diatur secara Nasional meskipun tingkat kemampuan daerah tidaklah sama. Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang menjadi acuan bagi pelaksanaan pendidikan di seluruh tanah air. Akan tetapi

tetap diperhatikan dan diberi ruang gerak untuk potensi sumber daya lokal.

Sistem pendidikan di Perancis mencerminkan elektivitas yang juga terdapat pada pemerintahan dan kehidupan sosial lainnya. Rakyat dan pemerintah Perancis memberi kewenangan pada dua majelis nasional representatif, yaitu: (1) Majelis Chamber of Deputies yang dipilih langsung oleh rakyat, dan (2) Senat yang dipilih oleh badan pemilih (electoral college). Di Indonesia bisa disamakan dengan DPR-RI yang pada komisi tertentu juga mengurus masalah pendidikan secara spesifik. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya rakyat tidak memerintah sendiri karena mereka telah mendelegasikan kedaulatannya kepada deputi-deputi terpilih dan para electoral (anggota electoral college), yaitu orang-orang yang secara teori berkualitas lebih baik untuk menjalankan pemerintahan secara rasional dibandingkan warga biasa.

Pendidikan di Perancis pada umumnya ditanggung oleh pemerintah di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan Nasional (Ministere de l'Education National). Di Indonesia, selain ditanggung oleh pemerintah pusat maka pendidikan juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah propinsi, kabupaten dan kota. Pemerintah daerah juga menyediakan anggaran pendidikan dalam APBD dan membuat kebijakan-kebijakan untuk pelaksanaan pendidikannya. Sama halnya dengan Indonesia, Perancis juga memberikan kesempatan yang sama dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat untuk memperoleh pendidikan.

- Perbandingan Pendidikan IPA di Perancis dan Indonesia

Jenjang atau tingkatan pendidikan yang harus ditempuh oleh para siswa adalah sebagai berikut:

1. École (sekolah), terdiri atas taman kanak-kanak (L'école maternelle) dan sekolah dasar (L'école élémentaire/ elementary school). Anak yang menempuh tingkat ini adalah anak-anak yang sebagian besar berusia 3 – 5 tahun untuk TK dan usia 6 – 11 tahun untuk SD.

- Taman Kanak-Kanak (L'école maternelle)

Di Perancis, pada tahun 2009, 11,6% anak usia 2 tahun dan hampir semua anak dari umur 3 sampai 5 tahun yang terdaftar di sekolah. Anak-anak mengembangkan kemampuan dasar mereka, meningkatkan bahasa mereka dan mulai menemukan dunia penulisan, jumlah dan bidang pelajaran lainnya. Mampu untuk menjalani pengalaman sekolah pertama dengan sukses adalah tujuan utama dari TK.

- Sekolah Dasar (L'école élémentaire/ elementary school).

Sekolah dasar ditempuh oleh anak-anak yang berumur 6 sampai 11 tahun. Ada lima tingkatan: CP, CE1, CE2, CM1 dan CM2. Pada tahun 2009-2010, Perancis memiliki 32.609 sekolah dasar negeri dan 5.174 swasta.

2. COLLÈGE (sekolah menengah / lower secondary school)

Collège (sekolah menengah / lower secondary school) disebut juga sebagai pendidikan menengah pertama yang wajib ditempuh sampai usia 15 tahun atau hingga usia 16 tahun termasuk awal pendidikan di sekolah tinggi. Pada tingkat sekolah menengah ini, siswa harus menempuh pendidikan umum dan pendidikan eksplorasi.

- Kurikulum Pendidikan Sekolah Perancis

Mata pelajaran Tujuan Program IPA DAN BUMI

1. Memperoleh elemen penting dari kemampuan membaca ilmiah untuk memahami fungsi tubuh manusia, dunia kehidupan, Bumi dan lingkungan.
2. Siswa mengamati fenomena atau organisme hidup, ada pertanyaan, berspekulasi, melakukan manipulasi dan percobaan: mereka belajar dan proses ilmiah.
3. Mereka juga menyadari pentingnya keselamatan, menghormati orang lain dan kebutuhan bagi setiap orang untuk merasa bertanggung jawab terhadap lingkungan dan kesehatan

- Tingkat keenam: Siswa mengamati lingkungan sekitarnya untuk memahami dua aspek
- Tingkat kelima: Siswa sampai pada tingkat pertama pemahaman fungsi gizi pada manusia, fungsi paru di makhluk hidup, dinamika planet dari manifestasi permukaan
- Tingkat keempat: Reproduksi seksual pada makhluk hidup dan manusia, mekanisme transmisi saraf dan hormon dalam tubuh dan cara kerja di dalam planet ini yang dipelajari
- Tingkat ketiga: Dengan genetika dan imunologi pengetahuan manusia diperkaya.

#### Kurikulum Pendidikan IPA Sekolah Dasar di Indonesia

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SD/MI/SDLB dimaksudkan untuk mengenal, menyikapi, dan mengapresiasi ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menanamkan kebiasaan berpikir dan berperilaku ilmiah yang kritis, kreatif dan mandiri.

Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berkembang secara dinamis, oleh karena itu semangat dan isi kurikulum mendorong peserta didik untuk mengikuti dan memanfaatkan secara tepat perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

Pembelajaran IPA sebaiknya dilaksanakan secara inkuiri ilmiah (*scientific inquiry*). Untuk menumbuhkan kemampuan berpikir, bekerja dan bersikap ilmiah serta mengkomunikasikannya sebagai aspek penting kecakapan hidup. Oleh karena itu pembelajaran IPA di SD/MI menekankan pada pemberian pengalaman belajar secara langsung melalui penggunaan dan pengembangan keterampilan proses dan sikap ilmiah. Pembelajaran IPA SD/MI ditekankan pada pembelajaran Salingtemas (Sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat). Yang diarahkan pada pengalaman belajar untuk merancang dan membuat suatu karya melalui

penerapan konsep IPA dan kompetensi bekerja ilmiah secara bijaksana.

Rumusan tujuan pembelajaran IPA di SD/MI seperti di atas secara jelas dan tegas memberi informasi bahwa pelaksanaan pembelajaran IPA tidak melalui pemindahan pengetahuan (istilah, fakta, konsep, prinsip, hukum/teori) dari guru kepada siswa, tetapi menjadi suatu kewajiban bahwa pembelajaran IPA harus melalui inkuiri ilmiah (penyelidikan), dan melalui penerapan konsep-konsep IPA dalam bentuk merancang dan membuat suatu karya. Dengan pembelajaran IPA seperti ini maka akan memberi kebermaknaan hasil belajar bagi diri siswa dalam menjalani kehidupan di alam ini.

Berikut ini dicontohkan pembelajaran IPA yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran IPA seperti yang dipaparkan di atas. Misal pembelajaran IPA Kelas V semester 2 dari KD 5.2: Menjelaskan pesawat sederhana yang dapat membuat pekerjaan lebih mudah dan lebih cepat. Berdasarkan pesan yang tersurat dalam KD tersebut dapat dimaknai bahwa kompetensi “menjelaskan” yang harus dikuasai siswa tidak mungkin dapat diperoleh hanya melalui diskusi saja, namun harus melalui berbuat melakukan proses-proses sains. Dengan melakukan proses sains siswa dapat berinkuiri ilmiah. Dari berinkuiri siswa akan menemukan sejumlah bukti (fakta) untuk dasar berpikir membangun konsep “pesawat sederhana membuat pekerjaan lebih mudah dan lebih cepat”. Sebelum ini siswa telah mengenal nama-nama, letak komponen tuas dan arti masing-masing komponen (sebagai pengetahuan awal siswa ketika memasuki pembelajaran ini).

Kompetensi Dasar (KD) mata pelajaran IPA SMP/ sederajat

Kompetensi dasar pada Kurikulum 2013 SMP/MTs berisi kemampuan dan muatan pembelajaran untuk mata pelajaran pada SMP/MTs yang mengacu pada Kompetensi Inti. Kompetensi dasar dirumuskan untuk mencapai Kompetensi Inti. Rumusan kompetensi dasar dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik dan kemampuan peserta didik, dan kekhasan masing-masing mata pelajaran. Berikut contoh kompetensi-

kompetensi dasar mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berdasarkan Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016.

### PENGETAHUAN

1. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.
2. Menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar (baku).
3. Mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati.
4. Menjelaskan konsep campuran dan zat tunggal (unsur dan senyawa), sifat fisika dan kimia, perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari.

### KETERAMPILAN

Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.

1. Menyajikan data hasil pengukuran dengan alat ukur yang sesuai pada diri sendiri, makhluk hidup lain, dan benda-benda di sekitar dengan menggunakan satuan tak baku dan satuan baku.
2. Menyajikan hasil pengklasifikasian makhluk hidup dan benda di lingkungan sekitar berdasarkan karakteristik yang diamati.
3. Menyajikan hasil penyelidikan atau karya tentang sifat larutan, perubahan fisika dan perubahan kimia, atau pemisahan campuran.
4. Menganalisis konsep suhu, pemuai, kalor, perpindahan kalor, dan

penerapannya dalam kehidupan sehari-hari termasuk.

5. Melakukan percobaan untuk menyelidiki pengaruh kalor terhadap suhu dan wujud benda serta perpindahan kalor. Kompetensi Dasar (KD) mata pelajaran IPA SMP/ sederajat.

Pencapaian mata pelajaran IPA SMA/ sederajat

Mata Pelajaran Fisika. Elemen Pemahaman Sains Pada akhir fase E peserta didik mampu mendeskripsikan gejala alam dalam cakupan kerja ilmiah dalam pengukuran, evolusi alam semesta dan tata surya, perubahan iklim, pemanasan global, lingkungan fisik dan kesehatan manusia, serta energi alternatif dan pemanfaatannya.

Mata Pelajaran Kimia. Elemen Pemahaman Sains Peserta didik mampu mengamati, menyelidiki dan menjelaskan fenomena sesuai kaidah kerja ilmiah dalam menjelaskan konsep kimia dalam kehidupan sehari-hari; menerapkan konsep kimia dalam pengelolaan lingkungan termasuk menjelaskan fenomena pemanasan global; menuliskan reaksi kimia dan menerapkan hukum-hukum dasar kimia; memahami struktur atom dan aplikasinya dalam nanoteknologi.

Mata Pelajaran Biologi. Elemen Pemahaman Sains Pada akhir fase E, peserta didik memiliki kemampuan menciptakan

solusi atas permasalahan-permasalahan berdasarkan isu lokal atau global dari pemahamannya tentang keanekaragaman makhluk hidup dan peranannya, virus dan peranannya, penerapan bioteknologi, komponen ekosistem dan interaksi antar komponen serta perubahan lingkungan.

- Perbandingan Kurikulum Negara Maju Dan Negara Berkembang

Membandingkan pendidikan di Perancis dengan Indonesia dapat diasosiasikan dengan membandingkan pendidikan di negara maju dengan negara berkembang. Ada beberapa kriteria pendidikan di negara maju dan di

negara berkembang yang telah terlaksana selama ini, yaitu :

- Faktor Mempengaruhi Pendidikan di Negara Maju

The relationship between education and employment and preparation for the transition from school to work. (Hubungan antara pendidikan pendidikan dan dunia kerja dari sekolah ke pekerjaan sudah ada), A commitment to life-long education. (Adanya komitmen untuk melaksanakan pendidikan seumur hidup), The expansion of educational facilities. (Penyediaan fasilitas pendidikan yang cukup memadai), Teacher education for tomorrow. (Pendidikan guru untuk persiapan ke masa depan).

Faktor Mempengaruhi Pendidikan di Negara Berkembang yaitu ; Secara ekonomi, pada umumnya miskin dan masih sangat tergantung pada alam, Secara demografis, pada umumnya padat penduduk, dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi, Secara budaya, masih kuat berpegang pada nilai budaya, Perbandingan mahasiswa dengan gelar doktor di universitas tidak memadai karena mahasiswa tidak didorong untuk meraih gelar doktor dan bekerja di universitas, Universitas kurang memperhatikan masalah masyarakat dan telah gagal untuk mengembangkan kerjasama dengan lembaga negara dan lembaga swadaya masyarakat untukantisipasi isu-isu seperti pendidikan, kesehatan, energi, pertanian dan jasa, Program pendidikan di perguruan tinggi belum siap untuk memenuhi kebutuhan sektor usaha.

#### 4. KESIMPULAN

Memperbandingkan sistem pendidikan antara beberapa negara penting artinya untuk mentransfer hal-hal positif yang telah dilakukan oleh suatu negara. Bagi Indonesia perlu mengenal bentuk dan model pendidikan di negara lain karena sistem pendidikan Indonesia masih perlu penyempurnaan dan perubahan. Terutama Indonesia perlu melihat kepada beberapa negara yang telah maju sistem pendidikannya, seperti Finlandia, Inggris, Australia, Amerika Serikat, Perancis dan sebagainya.

Memperbandingkan sistem pendidikan tidak dapat dilakukan serta merta karena ada nilai-nilai khusus yang tidak dapat dipersandingkan serta kekuatan lokal yang tidak dapat ditransfer secara utuh. Misalnya sistem pendidikan di Jepang yang masih sangat kuat berpegang teguh kepada nilai-nilai budaya setempat yang belum tentu dimiliki oleh negara lain. Sementara itu Indonesia memiliki nilai-nilai luhur Pancasila yang menjadi dasar sistem pendidikan sehingga menjadi kekhasan pendidikan di negara ini.

Sistem pendidikan Indonesia dan Perancis tidak dapat dipersandingkan secara utuh, namun ada beberapa nilai-nilai yang dapat diaplikasikan dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Apalagi Perancis adalah salah satu negara yang maju pendidikannya dan telah menjadi tujuan oleh mahasiswa dari berbagai penjuru dunia. Perancis juga berhasil mensejajarkan antara pendidikan dengan lapangan kerja sehingga tamatan pendidikan dari berbagai tingkatan dapat langsung bekerja sesuai keahliannya. Selanjutnya Indonesia juga perlu menjalin kerjasama dengan Perancis untuk menyusun sistem pendidikan yang lebih baik.

#### 5. REFERENSI

- Amtu, Onisimus, 2011, Manajemen Pendidikan di Era Otonomi Daerah, Bandung, Alfabeta,
- Hasbullah, 2011, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan, Jakarta, Raja Grafindo Persada,
- Hikmat, 2009, Manajemen Pendidikan, Bandung, Pustaka Setia,
- JURNAL SEKOLAH DASAR – ANDES SAFARANDES ASMARA & IWAN JUNAEDI
- Nur, Agustiar Syah, 2002, Prof.Dr.Drs.H.MA, Perbandingan Sistem Pendidikan 15 Negara, Cetakan I, Bandung, Lubuk Agung,
- Noor, I. H. 2010. Penelitian dan Pengabdian Masyarakat pada Perguruan Tinggi. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan. 16(3). B285-29.
- Prayitno, 2011, Arah ke Paradigma Pendidikan Indonsia, Padang, UNP Press,

Syafaruddin, 2008, Efektifitas Kebijakan Pendidikan, Jakarta, Rineka Cipta,

Tilaar, H.A.R., dan Nugroho, R., 2008, Kebijakan Pendidikan. Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Publik, Yogyakarta, Pustaka Pelajar,

Tilaar, H.A.R., 2002, Pendidikan untuk Masyarakat Indonesia Baru, Jakarta, Grasindo,

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasion

adoc.pub\_oleh-nuri-rizki-s-oki-sandra-a-niswati-zahro-fitri.pdf